

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Dapat Dana Hibah dari Pemerintah Pusat

Gambir, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) menandatangani Perjanjian Hibah Daerah Pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase II Koridor Utara - Selatan.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kemenkeu RI, Ubaidi Socheh Hamidi.

Penandatanganan ini merupakan komitmen pendanaan agar pembangunan dan pengoperasionalan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dapat berjalan maksimal serta aman secara finansial. Anies mengatakan, penandatanganan hibah ini memiliki peran penting sebagai dasar pengembangan konstruksi proyek MRT Fase II untuk Koridor Utara - Selatan.

"Alhamdulillah rencana dan persiapan panjang hari ini tuntas. Insyaallah akan menjadi pondasi penting dalam memastikan proyek bersejarah ini. Karena itu, dana hibah dari Pemerintah Pusat akan sangat memperlancar proses pembangunan dan pengembangan proyek MRT ini," ujar Anies di Balai Kota, Rabu (13/2).

Anies juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta bakal mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, seperti penyediaan fasilitas penunjang hingga laporan keuang-

an. "Kami *all out*, dari mulai menyediakan fasilitas penunjang untuk pembangunan MRT sampai kewajiban menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan," ungkap Anies.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan *update* ke Kemenkeu serta Kemenhub, sehingga apa yang dikerjakan dapat dipertanggung jawabkan ke publik," papar Anies.

Menunggu

Pemprov DKI Jakarta juga masih menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara untuk membangun gardu listrik Monas. Gardu listrik akan menjadi sumber pasokan listrik MRT Jakarta Fase 2 rute Bundaran HI-Kota Tua.

Peletakan batu pertama atau *groundbreaking* MRT Fase 2 tidak bisa direalisasikan sebelum rekomendasi dari Kemensetneg terbit. "Dari Setneg belum ada (rekomendasi)," ujar Anies, seperti dikutip *kompas.com*. Anies menyampaikan, Kemensetneg masih harus mengumpulkan data dari berbagai kementerian sebelum menerbitkan rekomendasi.

Sebab, pembangunan gardu listrik berada di ring 1 Ibu Kota. "Dari kabar terakhir, Setneg masih mengumpulkan data dari kementerian-kementerian yang relevan untuk menjawab," kata Anies. *Groundbreaking* MRT Ffase 2

mulanya direncanakan pada Januari 2019. Namun rencana itu batal. (m16/sit)



Insyaallah akan menjadi pondasi penting dalam memastikan proyek bersejarah ini.

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Dapat Dana Hibah dari Pemerintah Pusat

Dukung Menyeluruh

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Astera Primanto Bhakti, mengatakan pemberian hibah ini sangat penting, terlebih Pemerintah Pusat memandang MRT juga salah satu proyek strategis nasional.

"Kami di Pemerintah Pusat mendukung secara menyeluruh, karena ini proyek strategis nasional yang akan memberikan dampak bukan hanya warga Jakarta melainkan juga seluruh rakyat

Indonesia," ucap Astera. Dalam perjanjian tersebut mencakup dana hibah sebesar 70.021.000.000 Japan Yen (JPY).

Seperti diketahui dalam pendanaan proyek MRT Jakarta, Pemprov menanggung beban pinjaman sebesar 51 persen, sementara Pemerintah Pusat menanggung 49 persen yang diterus hibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Komposisi bagi Pemerintah Pusat memang lebih kecil dengan pertimbangan beban pinjaman

Rincian Penggunaan Dana Hibah

- Pekerjaan sipil dan peralatan senilai JPY 59.108.000
- Jasa konsultasi senilai JPY 6.311.000.000
- Dana tak terduga senilai JPY 4.602.000.000

digunakan untuk pembangunan aset yang tidak menghasilkan, seperti terowongan jalur bawah tanah MRT. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta mengelola aset yang menghasilkan, seperti stasiun MRT. (m16)